

INTEGRASI NILAI-NILAI KRISTEN DALAM PEMERINTAHAN: KAJIAN NORMATIF-TEOLOGIS ATAS KEPEMIMPINAN PELAYAN

Jonidius Illu*, Jumadi, Stenly Reinal Paparang, Sorimuda Sarumpaet

Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta, Indonesia

*Korespondensi: joni.illu@gmail.com

Abstract. *This article explores the challenges of applying Christian values within governmental leadership and their impact on the quality of democracy and national diversity. The purpose of this study is to formulate relevant Christian values and integrate them into the context of Indonesia's public administration. Using a normative-theological and qualitative-descriptive approach, the research analyzes theological and biblical literature, conceptual frameworks, governmental practices, and comparative studies. The findings highlight several core values — including love, justice, integrity, humility, service, and moral responsibility — that can form the foundation of a servant leadership model for government. In conclusion, integrating these Christian values into governmental leadership offers a transformative approach, strengthening democratic practices and restoring public trust through service, justice, and integrity as guiding principles for leaders.*

Keywords: *Christian values, governmental leadership, integration, normative-theological study, servant leadership.*

Abstrak. Artikel ini membahas kegagalan penerapan nilai-nilai Kristen dalam praktik kepemimpinan pemerintahan yang berdampak pada melemahnya demokrasi dan kebhinekaan. Berangkat dari realitas tersebut, kajian ini bertujuan merumuskan nilai-nilai Kristen yang relevan dan dapat diintegrasikan ke dalam pola kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Dengan pendekatan normatif-teologis dan metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini memanfaatkan studi literatur teologis dan biblika, analisis konseptual, telaah praktik pemerintahan, serta kajian komparatif guna menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Kristen seperti kasih, keadilan, integritas, kerendahan hati, pelayanan, dan tanggung jawab moral dapat menjadi landasan normatif bagi model kepemimpinan pelayan yang menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Kesimpulannya, integrasi nilai-nilai Kristen dalam kepemimpinan pemerintahan menawarkan pendekatan transformatif yang dapat memperbaiki tata kelola publik, memperkuat demokrasi, dan memulihkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan, keadilan, dan integritas sebagai nilai-nilai kunci dalam memimpin pemerintahan.

Kata kunci: integrasi, kajian normatif-teologis, kepemimpinan pelayan, kepemimpinan pemerintahan, nilai-nilai Kristen.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan dalam pemerintahan merupakan elemen fundamental dalam membentuk arah dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam setiap level pemerintahan, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keadilan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas sosial-politik. Akan tetapi, dalam realitas kontemporer, banyak pemimpin justru gagal memenuhi panggilan tersebut, karena terjebak dalam praktik kekuasaan yang koruptif, otoriter, dan tidak bermoral. Gejala ini terlihat nyata dalam maraknya korupsi, nepotisme, penyalahgunaan kewenangan, serta lemahnya akuntabilitas publik di berbagai sektor pemerintahan.

Data dari *Transparency International* (2023) menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia masih belum menunjukkan perbaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan di

Indonesia juga menunjukkan kecenderungan yang menurun, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dalam temuan berbagai survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI). Lembaga ini secara konsisten mencatat bahwa persepsi publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik berada di tingkat terendah, khususnya saat muncul kasus-kasus etik, korupsi, atau skandal politik yang melibatkan pejabat publik. Burhanuddin Muhtadi (2022), dalam laporan survei nasional yang dirilis IPI, menunjukkan bahwa publik cenderung skeptis terhadap komitmen moral para pemimpin politik dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan kepemimpinan bukan hanya persoalan manajerial atau administratif, tetapi juga merupakan krisis moral dan spiritual yang serius. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk menghadirkan model kepemimpinan alternatif yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga berakar pada nilai-nilai moral dan transendental.

Dalam konteks tersebut, nilai-nilai Kristen menawarkan landasan etis dan spiritual yang relevan untuk diintegrasikan ke dalam kepemimpinan pemerintahan. Nilai seperti kasih, keadilan, kerendahan hati, integritas, pengampunan, dan tanggung jawab bukanlah sekadar nilai religius privat, tetapi prinsip universal yang dapat memperkaya praktik pemerintahan yang adil dan humanistik (Marshall, 2002; Volf, 2011). Kekristenan, dalam tradisi teologisnya, memandang kekuasaan sebagai amanat dari Tuhan, bukan sebagai alat dominasi atau kontrol atas sesama manusia (Wright, 2008). Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai ini diharapkan mampu memberikan arah baru bagi model kepemimpinan publik yang selama ini cenderung terjebak dalam logika kekuasaan pragmatis dan hasil instan.

Konsep kepemimpinan dalam teologi Kristen sangat dipengaruhi oleh teladan Yesus Kristus, yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani (Mark. 10:45). Perspektif ini dikenal luas dengan istilah *servant leadership* atau kepemimpinan pelayan. Gagasan ini pertama kali diformulasikan secara sistematis oleh Robert K. Greenleaf dalam esainya *The Servant as Leader* (1970), di mana ia menegaskan bahwa pemimpin yang sejati adalah pelayan terlebih dahulu, dan kepemimpinan tumbuh dari komitmen untuk melayani (Greenleaf, 2013). Pemimpin seperti ini tidak didorong oleh ambisi untuk menguasai, melainkan oleh dorongan moral untuk mengangkat dan memberdayakan orang lain. Pendekatan ini kemudian diperkaya oleh berbagai pemikir seperti Spears (2010) dan Sendjaya (2015), yang menekankan bahwa akar terdalam *servant leadership* dapat ditemukan dalam kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus.

Servant leadership mengedepankan nilai-nilai seperti empati, kesadaran diri, pendengaran aktif, penyembuhan relasi, komitmen terhadap pertumbuhan pribadi orang lain, dan pembangunan komunitas yang sehat (Spears, 2010). Model ini menolak struktur kepemimpinan hierarkis tradisional yang menempatkan pemimpin sebagai sosok superior yang tidak dapat dikritik. Sebaliknya, pemimpin pelayan adalah individu yang rendah hati, terbuka terhadap masukan, dan berkomitmen untuk

memberdayakan orang-orang yang dipimpinnya (Eva et al., 2019; van Dierendonck, 2011). Dalam konteks pemerintahan, pendekatan ini sangat penting karena mampu membangun gaya kepemimpinan yang partisipatif, humanistik, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang kompleks dan beragam.

Manfaat *servant leadership* dalam pemerintahan tidak hanya bersifat etis, tetapi juga praktis. Pemimpin yang melayani akan lebih mampu membangun kepercayaan publik, karena gaya kepemimpinannya memancarkan ketulusan dan integritas. Ketika pemimpin tidak mengejar kepentingan pribadi atau partai, tetapi tulus melayani rakyat, maka legitimasi politik pun akan meningkat secara alami. Selain itu, pendekatan ini mendorong kolaborasi lintas sektor, karena pemimpin pelayan tidak bekerja secara eksklusif, melainkan mengakui pentingnya kerja bersama dan mendengarkan berbagai suara, termasuk dari kelompok minoritas atau yang terpinggirkan.

Dalam sistem demokrasi yang pluralistik seperti Indonesia, *servant leadership* juga berperan penting dalam meredam konflik identitas dan memperkuat solidaritas sosial. Karena nilai-nilai yang diusung bersifat universal dan inklusif, seperti kasih dan keadilan, maka penerapannya dapat melintasi batas agama, etnis, dan kelas sosial. Pemimpin pelayan akan menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kepentingan tanpa mengorbankan prinsip etika dan keadilan. Oleh sebab itu, model ini sangat relevan sebagai pendekatan kepemimpinan publik yang kontekstual dan transformatif.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas pentingnya nilai-nilai moral dalam kepemimpinan. Dames (2017), dalam kajiannya di Afrika Selatan, menyatakan bahwa integrasi nilai-nilai iman ke dalam kepemimpinan publik mampu memperkuat kualitas demokrasi dan etika pemerintahan, terutama dalam konteks masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial dan krisis kepercayaan terhadap institusi. Ia menekankan bahwa pemimpin yang dibentuk oleh kesadaran spiritual tidak hanya menjalankan mandat administratif, tetapi juga menjadi pembawa harapan moral dalam masyarakat. Pemimpin seperti ini berkontribusi dalam pembentukan tatanan sosial yang lebih adil dan bermartabat.

Temuan ini sejalan dengan kecenderungan global bahwa krisis kepemimpinan sering kali tidak terletak pada kurangnya kapasitas teknis, melainkan pada rapuhnya fondasi etis dan spiritual. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai iman, termasuk nilai-nilai Kristen, menjadi krusial untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dalam konteks inilah model kepemimpinan pelayan (*servant leadership*) yang berakar pada prinsip-prinsip iman Kristen memperoleh relevansinya, tidak hanya secara religius, tetapi juga sosial-politik.

Di Indonesia, Gunawan (2021) menyoroti pentingnya integritas rohani dalam organisasi gerejawi, namun belum secara eksplisit menelaah bagaimana nilai-nilai Kristen diterapkan dalam kepemimpinan pemerintahan. Kajian lain oleh Sendjaya (2015) lebih menekankan dimensi psikologis dari *servant leadership*, terutama dalam sektor pendidikan dan bisnis.

Sementara itu, riset-riset etika kepemimpinan seperti oleh Maak dan Pless (2006) fokus pada konsep *responsible leadership* dalam korporasi, tanpa menyentuh dimensi normatif-teologis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun diskursus tentang *servant leadership* cukup berkembang di dunia akademik, namun pendekatan yang secara eksplisit menggabungkan kerangka teologi Kristen dengan praktik kepemimpinan dalam konteks pemerintahan masih relatif langka, khususnya di Indonesia. Di sinilah letak kesenjangan riset (*research gap*) yang ingin dijawab oleh artikel ini.

Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk menjembatani antara tradisi iman Kristen dan praktik kepemimpinan publik. Dengan pendekatan normatif-teologis, artikel ini bertujuan merumuskan bagaimana nilai-nilai Kristen dapat diintegrasikan secara konseptual dan praktis ke dalam sistem pemerintahan modern. Penulis tidak hanya menawarkan deskripsi normatif, tetapi juga refleksi teologis yang kontekstual, disertai implikasi praktis untuk membentuk gaya kepemimpinan yang lebih etis, melayani, dan memberdayakan.

Melalui kajian ini, diharapkan muncul kesadaran baru bagi para pemimpin Kristen yang terlibat dalam pemerintahan, bahwa panggilan mereka bukan semata-mata menjalankan kekuasaan administratif, melainkan menjadi perpanjangan tangan Allah untuk mewujudkan keadilan, kasih, dan kesejahteraan bersama. Kepemimpinan tidak lagi dipahami sebagai privilese, tetapi sebagai amanah pelayanan yang penuh tanggung jawab, baik secara sosial maupun spiritual.

Dengan demikian, artikel ini menyumbangkan kontribusi teoretis dalam pengembangan teologi publik serta memberikan kerangka kerja bagi penguatan kepemimpinan etis di lingkungan pemerintahan. Dalam situasi bangsa yang haus akan keteladanan dan moralitas publik, integrasi nilai-nilai Kristen dalam kepemimpinan pemerintahan bukan sekadar idealisme, melainkan kebutuhan nyata yang mendesak dan relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-teologis dengan metode kajian pustaka. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip teologis dari iman Kristen yang dapat diintegrasikan ke dalam praktik kepemimpinan pemerintahan, khususnya melalui model *servant leadership*. Kajian ini menekankan pada penyusunan dasar normatif yang bersumber dari Kitab Suci, tradisi teologi Kristen, serta refleksi atas konteks sosial-politik masa kini.

Sumber utama dalam kajian ini meliputi Alkitab, literatur teologi sistematika dan praktika, buku-buku etika Kristen, serta artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Literatur dipilih berdasarkan tiga kriteria: (1) relevansi dengan topik kepemimpinan Kristen, (2) kredibilitas akademik, dan (3) kontribusi terhadap pemahaman teologis dalam ruang publik. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep dan nilai normatif yang bersumber dari teks dan tradisi Kristen (Anggito & Setiawan, 2018).

Kerangka kerja penelitian ini dibangun melalui empat tahapan analisis yang saling terkait. Pertama, dilakukan telaah biblis-teologis untuk menggali prinsip-prinsip kepemimpinan pelayan dari Kitab Suci, dengan menempatkan Yesus Kristus sebagai teladan utama, khususnya sebagaimana tercermin dalam Markus 10:45. Selanjutnya, kajian etika Kristen dilakukan untuk mengeksplorasi nilai-nilai seperti kasih, keadilan, integritas, dan kerendahan hati sebagai dasar moral kepemimpinan publik. Tahap ketiga adalah refleksi kontekstual-sosipolitik yang mengaitkan prinsip-prinsip tersebut dengan realitas kepemimpinan di Indonesia, termasuk tantangan integritas, polarisasi politik, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terakhir, dilakukan sintesis normatif-praxis guna merumuskan peta jalan teologis yang mengintegrasikan nilai-nilai Kristen secara etis dan kontekstual ke dalam praktik kepemimpinan di ruang publik.

Sebagaimana dinyatakan oleh Sendjaya (2015), *servant leadership* tidak hanya merupakan teori kepemimpinan berbasis nilai, tetapi juga berakar pada pandangan teologis tentang kekuasaan sebagai pelayanan. Pendekatan ini mengajak pemimpin untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, bukan mendominasi. Eva et al. (2019) dalam kajiannya menyatakan bahwa pendekatan *servant leadership* semakin relevan untuk konteks institusi publik ketika diterapkan melalui kerangka normatif dan nilai spiritual yang konsisten. Dalam konteks Asia, Kim (2008) menegaskan bahwa teologi publik yang normatif harus mampu memberi arah etis dan moral bagi kepemimpinan di tengah masyarakat plural, bukan hanya menjadi refleksi internal gereja.

Dengan menggunakan pendekatan normatif-teologis ini, penelitian ini berupaya menghubungkan prinsip iman Kristen dengan tantangan nyata dalam kepemimpinan pemerintahan masa kini, serta memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memperkaya model kepemimpinan pelayanan yang sesuai dengan kehendak Allah dan kontekstual bagi Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan pelayan dalam teologi Kristen memiliki landasan kuat secara biblis dan etis, serta relevan untuk diterapkan dalam konteks pemerintahan Indonesia masa kini. Pertama, melalui telaah biblis-teologis, ditemukan bahwa Yesus Kristus merupakan model utama kepemimpinan pelayan, sebagaimana tercermin dalam Markus 10:45 dan Yohanes 10:11. Kepemimpinan yang dikehendaki dalam Kitab Suci adalah kepemimpinan yang rela berkorban, mengutamakan kesejahteraan umat, dan menolak dominasi kekuasaan demi pelayanan sejati.

Kedua, kajian etika Kristen mengidentifikasi nilai-nilai fundamental yang dapat menjadi fondasi moral bagi kepemimpinan publik. Nilai kasih (*agape*) mendorong pemimpin untuk melayani masyarakat tanpa pamrih; keadilan (*justice*) menjadi orientasi dalam penyusunan kebijakan publik yang menjunjung keseimbangan dan keberpihakan pada yang lemah; integritas menjadi karakter utama pemimpin Kristen yang mencerminkan keselarasan antara iman dan tindakan; dan kerendahan hati

adalah bentuk pengosongan diri dari ambisi pribadi demi membangun kerja sama lintas sektor.

Ketiga, hasil refleksi kontekstual menunjukkan bahwa kepemimpinan pemerintahan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius, seperti krisis integritas, rendahnya kepercayaan publik, dan dominasi kekuasaan yang pragmatis. Di tengah kondisi tersebut, nilai-nilai Kristen menawarkan pendekatan kepemimpinan transformatif yang menekankan pelayanan, kejujuran, dan keberpihakan pada kebenaran. Kepemimpinan pelayan dalam pemerintahan dapat membentuk etos kerja, visi, dan tanggung jawab moral yang berdampak pada reformasi tata kelola publik.

Keempat, sintesis normatif-teologis menghasilkan sebuah jembatan antara ajaran iman Kristen dan praksis politik di ruang publik. Nilai-nilai iman tidak hanya bersifat spiritual privat, tetapi dapat berfungsi sebagai norma publik yang membentuk karakter pemimpin dan arah kebijakan. Untuk itu, dibutuhkan peta jalan (roadmap) yang kontekstual namun tetap berpegang teguh pada prinsip kekristenan. Dalam kerangka ini, kepemimpinan pelayan dipahami sebagai panggilan profetik untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di tengah masyarakat plural.

Terakhir, implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan pentingnya pendidikan kepemimpinan Kristen yang berfokus pada formasi karakter, bukan semata keterampilan teknis birokrasi. Gereja perlu mengambil peran aktif dalam mempersiapkan warganya untuk hadir sebagai garam dan terang dunia (Mat. 5:13–16) di ruang publik. Selain itu, kerangka etik Kristen dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan publik yang berorientasi pada kasih, keadilan, dan kebenaran sebagai nilai-nilai transformatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

PEMBAHASAN

Yesus Kristus sebagai Model Kepemimpinan Pelayan

Dalam tradisi iman Kristen, kepemimpinan tidak pernah dipahami sebagai dominasi atau kekuasaan absolut, melainkan sebagai bentuk pelayanan yang berlandaskan kasih dan pengorbanan. Figur Yesus Kristus menjadi pusat dari paradigma ini. Dalam Injil Markus 10:45, Yesus menyatakan secara eksplisit bahwa “Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya sebagai tebusan bagi banyak orang.” Pernyataan ini bukan sekadar slogan spiritual, melainkan deklarasi teologis yang merevolusi cara pandang tentang kekuasaan: dari instrumen pengendalian menjadi saluran pengabdian.

Lebih lanjut, Yohanes 10:11 menggambarkan Yesus sebagai “Gembala yang baik” yang rela menyerahkan nyawanya bagi domba-domba-Nya. Konsep gembala dalam konteks ini bukan hanya simbol kelembutan, tetapi juga integritas, tanggung jawab, dan kesetiaan dalam merawat dan melindungi umat. Kepemimpinan Yesus sangat kontras dengan model hierarkis-dominatif yang banyak ditemui dalam dunia politik dan pemerintahan. Ia memilih jalan kerendahan hati, keberpihakan pada yang

tertindas, serta komitmen terhadap kebenaran, meskipun harus menanggung penderitaan (Vanhoozer, 2014).

Model ini kemudian menjadi dasar dari gagasan *servant leadership* sebagaimana diformulasikan oleh Robert K. Greenleaf pada tahun 1970. Greenleaf menyatakan bahwa pemimpin yang sejati adalah pelayan terlebih dahulu, dan dari pelayanan itulah lahir otoritas moral untuk memimpin (Greenleaf, 2002). Konsep ini sejalan dengan pengajaran Yesus dan telah dikembangkan lebih lanjut oleh pemikir Kristen seperti Spears (2010), yang menyoroti karakteristik pemimpin pelayan, seperti empati, pendengaran aktif, kesadaran diri, dan komitmen terhadap pertumbuhan orang lain. Dalam terang teologi Kristen, kepemimpinan pelayan bukan sekadar gaya manajerial, tetapi adalah panggilan spiritual yang menuntut pemurnian motivasi dan kesediaan untuk mengorbankan diri demi kebaikan bersama.

Sebagaimana ditegaskan oleh Tomatala (2010), kepemimpinan dalam kekristenan berakar pada spiritualitas pelayanan yang diteladankan oleh Yesus Kristus, di mana pemimpin bukan sekadar pemegang otoritas, tetapi adalah hamba yang rela merendahkan diri, mengasahi, dan mengorbankan diri demi kepentingan orang lain. Dalam pandangannya, model kepemimpinan Yesus bukan hanya relevan bagi gereja, tetapi juga menjadi prinsip dasar bagi setiap bentuk kepemimpinan, termasuk dalam masyarakat dan pemerintahan, karena mengandung nilai-nilai universal yang menjunjung tinggi keadilan, kerendahan hati, dan kesetiaan terhadap kebenaran.

Dengan demikian, Yesus Kristus bukan hanya menjadi contoh ideal, tetapi juga dasar teologis dan etis dari kepemimpinan pelayan yang ingin diusung dalam konteks pemerintahan. Teladan-Nya memberikan arah baru bagi pemimpin publik, yakni bahwa otoritas sejati hanya dapat lahir dari kesediaan untuk melayani dan berkorban.

Nilai-Nilai Etika Kristen sebagai Fondasi Kepemimpinan Publik

Etika Kristen menawarkan kerangka moral yang kuat bagi pemimpin yang terlibat dalam ruang publik. Dalam konteks pemerintahan, krisis kepemimpinan bukan hanya disebabkan oleh ketidakmampuan teknis, tetapi terutama oleh kegagalan moral. Karena itu, kepemimpinan Kristen tidak cukup hanya mengandalkan visi dan strategi, tetapi harus ditopang oleh karakter yang dibentuk oleh nilai-nilai iman. Seperti dinyatakan oleh Sendjaya (2015), kepemimpinan Kristen hanya dapat menjadi transformatif jika dibangun di atas fondasi etis yang berakar pada teologi pelayanan dan spiritualitas karakter. Etika Kristen dalam hal ini bukan sekadar aturan moral, tetapi manifestasi iman yang hidup dalam tindakan pemimpin di tengah masyarakat.

Kasih (*agape*) merupakan inti dari etika Kristen dan menjadi fondasi utama relasi antara pemimpin dan masyarakat. Kasih bukan hanya perasaan, melainkan komitmen aktif untuk mengutamakan kesejahteraan orang lain. Dalam kerangka kepemimpinan publik, kasih mendorong pemimpin untuk melayani tanpa pamrih dan menjangkau mereka yang terpinggirkan. Volf (2011) menegaskan bahwa kasih merupakan prinsip dasar keterlibatan Kristen dalam ruang publik karena kasih melampaui kepentingan kelompok dan membuka jalan menuju rekonsiliasi dan keadilan sosial. Dalam dunia

pemerintahan yang sering kali didorong oleh kalkulasi politik, kasih menjadi daya pembeda yang mendorong keberpihakan kepada yang rentan.

Keadilan adalah prinsip etis berikutnya yang memiliki akar mendalam dalam narasi Alkitab. Dalam Mikha 6:8, Tuhan menuntut umat-Nya untuk “berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati.” Pemimpin yang berkeadilan akan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan elite atau golongan. Keadilan Kristen tidak netral, tetapi aktif berpihak kepada yang lemah (Wolterstorff, 2019). Dalam konteks Indonesia, di mana ketimpangan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi masalah besar, keadilan sebagai nilai teologis dapat membentuk pemimpin yang berani menegakkan kebenaran di tengah tekanan politis. Eva et al. (2019) juga menekankan bahwa keadilan adalah salah satu ciri menonjol dari pemimpin pelayan yang memiliki komitmen terhadap keseimbangan relasi kekuasaan.

Integritas dalam kepemimpinan Kristen dipahami sebagai keselarasan antara iman, prinsip moral, dan perilaku nyata. Pemimpin Kristen yang berintegritas tidak menjadikan iman sebagai simbol, melainkan sebagai dasar pembentukan karakter dan pengambilan keputusan. Sendjaya (2003) menyebut integritas sebagai inti dari *servant leadership* karena pemimpin sejati hanya dapat dipercaya ketika ada konsistensi antara kata dan perbuatan. Dalam budaya politik yang penuh kompromi, integritas menjadi kesaksian kenabian yang menunjukkan bahwa kepemimpinan dapat dijalankan tanpa manipulasi atau kepalsuan.

Kerendahan hati adalah nilai yang sering diremehkan dalam diskursus politik modern, tetapi justru menjadi kekuatan dalam kepemimpinan pelayan. Seperti dijelaskan oleh Kim (2008), kerendahan hati adalah ekspresi dari kesadaran akan keterbatasan manusia dan ketergantungan kepada Allah. Dalam praktiknya, pemimpin yang rendah hati terbuka terhadap koreksi, tidak anti-kritik, dan mampu merangkul kerja sama lintas perbedaan. Eva et al. (2019) mencatat bahwa kerendahan hati adalah elemen penting dalam menciptakan budaya organisasi yang sehat, karena memungkinkan terbangunnya relasi yang setara dan saling menghargai dalam kepemimpinan publik.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kasih, keadilan, integritas, dan kerendahan hati, kepemimpinan Kristen dalam pemerintahan dapat menghadirkan model alternatif yang tidak hanya etis tetapi juga transformatif. Nilai-nilai ini tidak bertentangan dengan sistem demokrasi modern, melainkan memperkaya demokrasi dengan dimensi spiritual yang memperkuat orientasi pada kesejahteraan bersama, kebenaran, dan pengabdian.

Konteks Sosial-Politik Indonesia dan Tantangan Kepemimpinan

Kepemimpinan publik di Indonesia saat ini berada dalam situasi yang kompleks dan penuh tekanan moral. Krisis integritas, maraknya korupsi, pragmatisme politik, dan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah merupakan gambaran nyata dari realitas sosial-politik kontemporer. Sekalipun sistem demokrasi terus berjalan secara prosedural, banyak praktik kekuasaan masih didominasi oleh

kalkulasi politik dan kepentingan sesaat, bukan oleh nilai-nilai etis atau tanggung jawab publik yang sejati.

Fenomena ini bukan hanya problem administratif atau kelembagaan, tetapi menunjukkan gejala yang lebih dalam: krisis moral dalam kepemimpinan. Dalam masyarakat modern yang semakin menyingkirkan nilai-nilai iman dari ruang publik, kepemimpinan Kristen dihadapkan pada tantangan untuk tetap berdiri teguh di tengah tekanan sistemik. Blamires (2003) menyebut situasi ini sebagai tanda dari era "pasca-Kristen", di mana wawasan Kristen tak lagi menjadi pusat rujukan moral, dan etika Injili harus berhadapan dengan relativisme serta pragmatisme yang mengaburkan kompas etis publik.

Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap institusi seperti DPR dan partai politik berada pada titik rendah, khususnya akibat berbagai skandal yang menggerus kepercayaan masyarakat (Muhtadi, 2022). Secara global, laporan Edelman Trust Barometer (2023) memperkuat realitas ini, dengan menempatkan pemerintah sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya, terutama ketika terjadi penyimpangan moral dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks inilah, nilai-nilai Kristen tidak hanya menjadi narasi spiritual internal, tetapi dapat dan harus berfungsi sebagai koreksi etis terhadap struktur kekuasaan yang menyimpang.

Salah satu nilai penting yang sangat relevan adalah integritas. Arisma, Josanti, dan Evimalinda (2019) menegaskan bahwa integritas dalam kepemimpinan Kristen tidak dapat dipisahkan dari kesaksian iman di ruang publik. Di tengah budaya kekuasaan yang sering mengaburkan batas antara benar dan salah, pemimpin Kristen harus tampil sebagai figur yang konsisten dalam prinsip dan tindakan. Lamb (2015) juga mengingatkan bahwa pemimpin Kristen bekerja bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di bawah pengamatan Tuhan, sehingga integritas menjadi manifestasi dari hidup yang bertanggung jawab secara spiritual dan sosial.

Tak kalah penting adalah penerapan nilai-nilai karakter Kristiani lainnya seperti kasih, keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Bangun (2022) menunjukkan bahwa karakter ini bukan hanya ideal teoretis, melainkan prinsip-prinsip praktis yang dapat dan perlu diterapkan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan kekuasaan, dan relasi sosial dalam ruang pemerintahan. Karakter Kristen membentuk pemimpin yang berpihak kepada kebenaran, terbuka terhadap koreksi, serta mampu menjembatani konflik dengan kasih dan keadilan sebagai fondasi.

Di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi, nilai-nilai pelayanan tetap relevan. Tomatala (2020) menyatakan bahwa *servant leadership* dapat menjadi pendekatan yang kontekstual karena menempatkan manusia, relasi, dan tanggung jawab moral sebagai pusat kepemimpinan. Dalam lanskap politik Indonesia yang semakin cepat berubah dan kompleks, pendekatan ini justru memperkuat akar spiritual dan sosial dari kepemimpinan yang berorientasi pada transformasi, bukan sekadar efisiensi.

Relevansi nilai-nilai Kristen dalam konteks sosial-politik Indonesia bukan hanya sebagai narasi alternatif, tetapi sebagai panggilan profetik. Seperti dikatakan oleh Volf (2011), orang percaya yang terlibat dalam ruang publik dipanggil bukan untuk memaksakan iman, tetapi untuk menghadirkan kasih dan keadilan sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah dan pelayanan kepada sesama. Dalam kerangka ini, pemimpin Kristen yang setia pada prinsip Injil akan menjadi penanda kehadiran Kerajaan Allah—bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan kesaksian hidup yang berdampak.

Integrasi Iman dan Kepemimpinan: sebuah Sintesis Normatif-Teologis

Dalam terang teologi Kristen, kepemimpinan bukan sekadar peran fungsional atau jabatan administratif, melainkan bagian dari panggilan ilahi. Oleh karena itu, integrasi antara iman dan kepemimpinan bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi seharusnya menjadi kerangka utama dalam merumuskan model kepemimpinan yang utuh dan bermakna. Kepemimpinan pelayan yang diteladankan oleh Yesus Kristus bukan hanya menginspirasi, tetapi menjadi dasar normatif yang membentuk seluruh aspek kepemimpinan Kristen, termasuk dalam konteks pemerintahan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Borrong (2019), dalam perspektif teologis, kepemimpinan Kristen harus dilihat sebagai bentuk pelayanan, bukan dominasi. Pemimpin Kristen tidak pertama-tama adalah pengatur kekuasaan, melainkan hamba yang menjalankan otoritasnya dengan pengabdian yang lahir dari iman. Pendekatan normatif-teologis tidak hanya berangkat dari idealisme etika Injili, tetapi juga dari realitas iman yang hidup. Dalam kerangka ini, iman bukan ditempatkan di ruang privat yang terpisah dari kehidupan publik, melainkan menjadi dasar etis dan spiritual yang menuntun tindakan pemimpin di tengah masyarakat.

Volf (2011) menegaskan bahwa iman Kristen tidak dipanggil untuk mendominasi ruang sosial, melainkan untuk memperkaya kehidupan bersama dengan kasih, keadilan, dan harapan. Oleh karena itu, integrasi iman dan kepemimpinan berarti menghadirkan nilai-nilai Injil dalam sistem pemerintahan tanpa kehilangan sensitivitas terhadap pluralitas dan demokrasi. Pardede (2023) juga menegaskan bahwa iman Kristen memiliki dimensi transformatif terhadap kebudayaan dan tatanan sosial, bukan untuk menolak dunia, melainkan untuk memperbaharui dan menggaraminya dari dalam.

Sintesis ini mencakup dua aspek penting. Pertama, iman memberikan kerangka orientasi: untuk siapa, dengan tujuan apa, dan dengan cara bagaimana seorang pemimpin melayani. Kepemimpinan Kristen yang sejati bersumber dari pengakuan bahwa kekuasaan adalah amanat, bukan hak milik. Maka, pemimpin tidak memerintah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Allah dan demi kebaikan sesama. Kedua, iman membentuk karakter dan motivasi pemimpin. Seorang pemimpin Kristen tidak hanya dilatih dalam strategi pemerintahan, tetapi dibentuk melalui disiplin rohani seperti doa, pembacaan Firman, persekutuan, dan refleksi teologis. Disiplin ini menumbuhkan kepekaan etis dan keberanian profetik dalam mengambil keputusan.

Dalam kaitan ini, Arisma et al. (2019) menekankan bahwa integritas bukan sekadar atribut moral umum, tetapi perwujudan iman yang hidup. Pemimpin Kristen

yang berintegritas menjalankan tanggung jawab publiknya bukan hanya untuk memuaskan opini masyarakat, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan yang memanggilnya. Bangun (2022) menambahkan bahwa karakter Kristiani seperti kasih, kesetiaan, tanggung jawab, dan kerendahan hati tidak hanya bisa diterapkan dalam lingkungan gereja, tetapi justru menemukan aktualisasinya yang utuh di ruang sosial dan pemerintahan.

Tomala (2019) secara tegas menyebut bahwa gaya kepemimpinan Kristen adalah “memimpin dengan melayani”—bukan sebagai metode, melainkan sebagai identitas. Seorang pemimpin yang mengintegrasikan imannya akan memandang tugasnya bukan sebagai jalur ambisi pribadi, tetapi sebagai bentuk pelayanan kepada sesama, dan kesaksian kepada dunia tentang karakter Kristus. Pemimpin seperti inilah yang mampu menjembatani antara logika iman dan realitas kekuasaan, dan menyatukan spiritualitas dengan tanggung jawab sosial.

Namun demikian, integrasi iman dan kepemimpinan ini tidak bebas dari tantangan. Dalam masyarakat plural, ada kekhawatiran bahwa penerapan nilai-nilai religius dapat melahirkan eksklusivisme. Oleh karena itu, pendekatan normatif-teologis harus selalu disertai dengan sensitivitas kontekstual dan semangat dialogis. Kim (2008) menggarisbawahi pentingnya teologi publik di Asia yang tidak hanya berbicara kepada umat gereja, tetapi juga kepada masyarakat luas dengan bahasa moral yang inklusif dan transformatif. Di sinilah pentingnya membangun peta jalan (*roadmap*) kepemimpinan Kristen dalam pemerintahan yang menjembatani iman dan praksis, tanpa kehilangan integritas teologis di tengah keberagaman.

Kesimpulannya, sintesis antara iman dan kepemimpinan bukanlah fusi dua dunia yang terpisah, melainkan pemulihan kesatuan antara nilai ilahi dan tanggung jawab duniawi. Pemimpin Kristen yang setia pada Injil akan melihat ruang pemerintahan bukan sebagai arena politik semata, tetapi sebagai ladang pelayanan, tempat untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah—dengan kasih, keadilan, dan kebenaran sebagai benderanya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai Kristen seperti kasih, keadilan, integritas, dan kerendahan hati memiliki relevansi normatif dan praktis dalam membentuk kepemimpinan pemerintahan yang etis dan melayani. Dalam terang kepemimpinan pelayan (*servant leadership*) yang diteladankan oleh Yesus Kristus, kepemimpinan tidak dipahami sebagai dominasi, tetapi sebagai pengabdian kepada Allah dan sesama. Integrasi iman Kristen ke dalam ruang publik bukan hanya mungkin, tetapi mendesak, terutama untuk menjawab krisis etika dan kepercayaan dalam sistem pemerintahan saat ini.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Fokusnya yang bersifat konseptual dan normatif belum mencakup studi empiris terhadap praktik kepemimpinan Kristen di pemerintahan Indonesia secara konkret. Selain itu, pendekatan yang digunakan belum mengeksplorasi dinamika pluralisme agama atau

tantangan lintas denominasi dalam menerapkan nilai-nilai iman di ruang publik yang kompleks dan multikultural.

Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan terhadap figur atau komunitas Kristen yang aktif dalam birokrasi atau politik praktis, guna mengkaji secara langsung bagaimana nilai-nilai Kristen dijalankan dalam realitas kepemimpinan yang dinamis. Kajian interdisipliner antara teologi, etika publik, dan ilmu sosial-politik juga penting untuk menjembatani idealisme normatif dengan tantangan kontekstual Indonesia masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jejak.
- Arisma, Y., Josanti, & Evimalinda, R. (2019). Nilai-Nilai Integritas Seorang Pemimpin Kristen. *Real Didache - Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 4(2), 61–65.
- Bangun, J. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Karakter Kristiani dalam Aktivitas Kepemimpinan Kristen. *HARVESTER: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen*, 7(1), 15–31. <https://doi.org/10.52104/harvester.v7i1.85>
- Blamires, H. (2003). *Pemikiran Pasca-Kristen: Mengenali Perlawanan terhadap Wawasan Kristen*. Momentum.
- Borrong, R. P. (2019). Kepemimpinan Dalam Gereja Sebagai Pelayanan. *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.36972/jvow.v2i2.29>
- Dames, G. E. (2017). Practical theology as embodiment of Christopraxis servant leadership in Africa. *HTS: Theological Studies*, 73(2), 1–9.
- Edelman. (2023). *2023 Edelman Trust Barometer Global Report*. Edelman Trust Barometer.
- Eva, N., Robin, M., Sendjaya, S., van Dierendonck, D., & Liden, R. C. (2019). Servant Leadership: A systematic review and call for future research. *Leadership Quarterly*, 30(1). <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2018.07.004>
- Greenleaf, R. K. (2013). *Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness*. Paulist Press.
- Kim, S. C. H. (2008). Christian theology in Asia. In *Christian Theology in Asia*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511803505>
- Lamb, J. (2015). *Integritas: Memimpin Dibawah Pengamatan Tuhan*. Perkantas.
- Maak, T., & Pless, N. M. (2006). Responsible leadership in a stakeholder society - A relational perspective. *Journal of Business Ethics*, 66(1). <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9047-z>
- Marshall, P. (2002). *God and the Constitution: Christianity and American Politics*. Bloomsbury Publishing.
- Muhtadi, B. (2022). *Survei Persepsi Publik terhadap Pemerintah dan DPR*. Indikator Politik Indonesia. <https://indikator.co.id/who-we-are-2/bm/>

- Pardede, J. (2023). *Injil dan Kebudayaan*. Momentum.
- Sendjaya, S. (2003). Development and Validation of Servant Leadership Behavior Scale. *Servant Leadership Research Roundtable, August*.
- Sendjaya, S. (2015). Personal and Organizational Excellence through Servant Leadership. In *Personal and Organizational Excellence through Servant Leadership*.
- Spears, L. C. (2010). Character and Servant Leadership: Ten Characteristics of Effective, Caring Leaders. *The Journal of Virtues & Leadership*, 1(1).
- Tomala, Y. T. (2019). Leading By Serving: Memimpin Dengan Melayani. *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama*, 2(2).
<https://doi.org/10.36972/jvow.v2i2.23>
- Tomatala, Y. (2010). *Memimpin Seperti Yesus Kristus*. YT Leadership.
- Tomatala, Y. (2020). Pemimpin Human Capital 4.0 Dan Kepemimpinan Global Di Era Milenial. *Jurnal Christian Humaniora*, 4(1), 18–32.
<https://doi.org/10.46965/jch.v4i1.12>
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- van Dierendonck, D. (2011). Servant leadership: A review and synthesis. In *Journal of Management* (Vol. 37, Nomor 4). <https://doi.org/10.1177/0149206310380462>
- Vanhoozer, K. J. (2014). *Faith Speaking Understanding: Performing the Drama of Doctrine*. Westminster John Knox Press.
- Volf, M. (2011). *A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good*. Brazos Press.
- Wright, N. T. (2008). *Surprised by Hope: Rethinking Heaven, the Resurrection, and the Mission of the Church*. Zondervan.